



EDISI SENIN 09 FEBRUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENTTODAY
Tegaskan Tak Mundur Hadapi Korupsi,
Prabowo Singgung Kekayaan Negara yang Hilang

04

NUSANTARA
Belajar dari Gempa Pacitan, Waspada
Megathrust Lepas Energi

10

LISTSTYLE
Bibir Blur hingga Efek
Multichrome Jadi Trend Makeup 2026

BARU DILANTIK, ADIES KADIR **TERSANDUNG ETIK**

Hari pertama Adies Kadir menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sejumlah akademisi serta praktisi hukum menilai proses pencalonannya bermasalah sejak awal. Saat laporan dibuat, pada waktu yang hampir bersamaan, Adies mulai bersidang untuk pertama kali di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia duduk sebagai anggota Panel II di bawah pimpinan Wakil Ketua MK Saldi Isra, memeriksa sejumlah permohonan pengujian undang-undang. Persidangan berlangsung singkat, tetapi debut tersebut tak terpisahkan dari kontroversi yang menyertai pengangkatannya. Situasi ini kembali memantik perdebatan mengenai mekanisme rekrutmen hakim konstitusi, khususnya dari jalur legislatif. Sebelum dilantik, Adies Kadir sebagaimana diketahui ditetapkan sebagai satu Hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Padahal sebelumnya ada nama Inosentius Samsul yang juga sudah ditetapkan sebagai usulan dari DPR. Bagi sebagian kalangan, perkara tersebut bukan sekadar figur personal. Tapi menyentuh soal mendasar terkait integritas kelembagaan serta daya tahan independensi MK di tengah tekanan politik. **BACA DI HAL 11....**

LANDASAN PELAPORAN KE MKMK

- PROSES PENCALONAN DINILAI BERMASALAH SEJAK AWAL
Seleksi Adies Kadir dianggap tidak sejalan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
- PERUBAHAN CALON TANPA MEKANISME JELAS
DPR semula menyetujui Inosentius Samsul, lalu menganulir keputusan dan mengusulkan Adies Kadir.
- POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Adies Kadir sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI, lembaga yang terlibat langsung dalam proses seleksi.
- DUGAAN PELANGGARAN ETIK PRA-JABATAN
Etika hakim dinilai berlaku sejak proses pencalonan, bukan hanya setelah resmi menjabat.
- DIDUGA MELANGGAR UU MAHKAMAH KONSTITUSI
Pencalonan dianggap bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

PAYUNG HUKUM HAKIM KONSTITUSI

DARI UNSUR PARLEMEN (DPR)

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa 3 (tiga) orang anggota hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan 3 orang dari Mahkamah Agung dan 3 orang dari Presiden.

POIN PENTING TERKAIT:

- KETENTUAN PENGALUAN:
Parlemen (DPR) berwenang mengajukan calon hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
- SYARAT:
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020, hakim haruslah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- MASA JABATAN:
Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- Aturan ini merupakan turunan dari Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur 9 anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden, dengan 3 diajukan MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden.

TUNTUTAN PELAPOR (CALS)

- MKMK memeriksa proses seleksi, bukan hanya perilaku hakim
- Penilaian etik substantif atas pengangkatan Adies Kadir
- Pencegahan konflik kepentingan dalam persidangan MK
- Pemberhentian Adies Kadir sebagai hakim konstitusi
- Upaya hukum lanjutan ke PTUN



TEGASKAN TAK MUNDUR HADAPI KORUPSI, PRABOWO SINGGUNG KEKAYAAN NEGARA YANG HILANG

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Dalam sejumlah kesempatan beruntun, Prabowo menyatakan tidak akan mundur selangkah pun menghadapi praktik korupsi yang, menurutnya, telah menggerus kekayaan bangsa dan merugikan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang besar, namun gagal dijaga oleh elite pengelola.

“Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut sejak menjabat sebagai presiden, dirinya mempelajari data-data mengenai kekayaan nasional dan

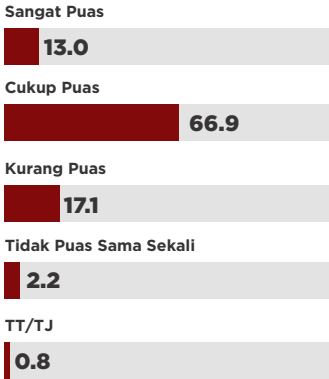


menemukan bahwa kebocoran terjadi secara sistematis. Karena itu, ia menegaskan pemerintahannya akan berdiri di garis depan pemberantasan korupsi.

“Kita tidak boleh ragu-ragu dan saya

dan pemerintah yang sebelah tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia,” ujarnya.

KINERJA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO



Kepuasan Publik terhadap Presiden 79,9 Persen Survei Indikator: Ditopang Pemberantasan Korupsi

TINGKAT kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada awal 2026. Angka tersebut terungkap dalam survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia dan menempatkan isu pemberantasan korupsi sebagai faktor utama penopang persepsi positif publik terhadap pemerintah.

Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan tingkat kepuasan tersebut relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Secara umum, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada Januari 2026 tidak jauh berbeda dibandingkan Januari 2025,” kata Burhanuddin, Minggu (8/2/2026).

Dari hasil survei, 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen puas terhadap

kinerja Presiden. Sementara 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak memberikan jawaban.

Menurut Burhanuddin, capaian tersebut tergolong tinggi untuk seorang presiden pada fase awal pemerintahan. Indikator mencatat tingkat kepuasan Prabowo melampaui capaian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada awal masa jabatan 2004 dan Presiden ke-7 Joko Widodo pada awal pemerintahan 2014.

Alasan utama kepuasan publik berkaitan langsung dengan agenda pemberantasan korupsi. Sebanyak 17,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden karena dinilai serius memberantas korupsi. Angka ini menjadi alasan tertinggi dibanding faktor lain, seperti pemberian bantuan sosial, kualitas program kerja, maupun hasil kebijakan yang mulai dirasakan masyarakat.

“Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujar Burhanuddin.

Survei juga menunjukkan adanya korelasi antara kepuasan terhadap

Presiden dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan tercatat mencapai 80 persen, tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Indikator mencatat meningkatnya persepsi positif publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional. Sebanyak 48,7 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi berada dalam kategori baik atau sangat baik.

Salah satu faktor yang memperkuat persepsi tersebut adalah keterbukaan Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Sebanyak 50,2 persen responden mengaku mengetahui aksi pengembalian aset hasil korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara. Dari kelompok yang mengetahui informasi tersebut, 70,7 persen menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap langkah tersebut.

“Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan,” kata Burhanuddin. (wid,ist,kum/dya)

Prabowo juga mengaitkan pemberantasan korupsi dengan agenda penghapusan kemiskinan. Ia menyebut kekayaan Indonesia sejatinya cukup untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat jika dikelola secara adil dan bersih.

“Kita harus bersatu, kita harus bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia dan apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insyaallah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera,” kata Prabowo.

Ia mencontohkan kebijakan di sektor pangan sebagai bukti awal. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengambil alih tata kelola distribusi pupuk sehingga harga dapat ditekan dan pasokan lebih merata. Ia juga mengklaim cadangan beras nasional kini berada di posisi tertinggi sepanjang sejarah.

“Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sabtu (7/2/2026), Prabowo juga menyinggung perlawanan yang dihadapinya dalam agenda pemberantasan korupsi. Saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, ia mengatakan upaya penegakan hukum kerap mendapat “serangan balik” dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi. (san,ist,tin/dya)

Gajah Sumatera Tewas Tanpa Kepala di Pelalawan

DPR TEGASKAN KEJAHATAN SERIUS

Kematian seekor gajah Sumatera dalam kondisi mengenaskan di kawasan hutan tanaman industri (HTI) Kabupaten Pelalawan, Riau, memantik keprihatinan DPR RI. Satwa dilindungi itu ditemukan tanpa kepala dan gading, dengan dugaan kuat menjadi korban perburuan liar. Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas peristiwa tersebut dan menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan serius terhadap satwa dilindungi. Ia menyebut pembunuhan gajah dengan cara mutilasi menunjukkan praktik perburuan yang kejam dan terorganisasi. Negara, kata dia, tidak boleh bersikap permisif terhadap kejahatan yang mengancam kelestarian satwa liar.

"Kejam sekali dan tentu kita sangat prihatin dan mengancam keras peristiwa terbunuhnya gajah Sumatera di Pelalawan, Riau. Ini adalah kejahatan serius terhadap satwa dilindungi dan harus diusut tuntas sampai pelakunya ditemukan," ujar Daniel, Minggu (8/2/2026).

Menurut Daniel, aparat penegak hukum wajib menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia



Bangkai Gajah Sumatera ditemukan mati di areal konsesi di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Foto: Dok. Polres Pelalawan

menekankan pentingnya pemberian sanksi berat sebagai efek jera, mengingat tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa satwa yang secara hukum dilindungi negara.

"Aparat penegak hukum wajib menindak tegas sesuai peraturan

perundang-undangan, dengan sanksi berat, karena perbuatan ini telah menyebabkan hilangnya nyawa satwa yang dilindungi," kata legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Daniel juga menyoroti lemahnya pengawasan sebagai salah satu faktor

Kasus Perburuan dan Kematian Terbaru (Februari 2026)

- **Pembunuhan Gajah di Riau (Februari 2026):** Gajah jantan >40 tahun ditemukan mati tanpa gading, kepala terpotong, di konsesi PT RAPP, Pelalawan.
- **Temuan Proyektil:** Dua proyektil peluru ditemukan, menunjukkan gajah ditembak sebelum gading diambil.
- **Tindakan Hukum:** Polda Riau mengusut jaringan pelaku dengan pendekatan ilmiah; ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara (UU No. 32/2024).

Konflik Manusia dan Gajah (2025-2026)

- **Serangan Fatal di Lampung Timur:** Kepala desa Braja Asri tewas diserang gajah saat menghalau kawanan ke TN Way Kambas (Jan 2026).
- **Kematian Akibat Racun di Aceh:** Beberapa gajah mati sepanjang 2025 di Aceh Timur dan Bener Meriah, diduga akibat racun.
- **Kematian Anak Gajah:** Anak gajah Nurlaila mati di PKG Sebang (Nov 2025); virus EEHV masih mengancam di TN Tesso Nilo.



Kemenhut Panggil PT RAPP

KEMENTERIAN Kehutanan memanggil jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan tanpa kepala dan gading di kawasan konsesi perusahaan tersebut di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pemanggilan dilakukan guna mendalami tanggung jawab pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar di wilayah kerjanya.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kemenhut) menyatakan langkah tersebut sejalan dengan penyelidikan atas dugaan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi. Lokasi temuan berada di kawasan lindung Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, yang merupakan bagian dari wilayah jelajah gajah pada kantong habitat Tesso Tenggara.

Kematian gajah tersebut pertama kali dilaporkan oleh PT RAPP kepada Polres Pelalawan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau pada Senin, 2 Februari 2026. Berdasarkan keterangan awal di lapangan, Tim Penanggulangan Konflik

Satwa Liar (TPKSL) Blok Ukui menemukan seekor gajah jantan dalam kondisi pembusukan lanjut.

Balai Besar KSDA Riau kemudian melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan gajah berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur lebih dari 40 tahun, dan telah mati sekitar dua pekan sebelum ditemukan. Dari hasil bedah bangkai, ditemukan indikasi cedera kepala berat yang secara medis mengarah pada trauma kepala akibat lukutembak.

Kondisi bangkai yang ditemukan tanpa kepala dan gading memperkuat dugaan adanya tindak kejahatan perburuan satwa liar. Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan dua potongan logam yang diduga proyektil peluru.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa setiap bentuk perburuan dan pembunuhan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius dan akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanggung jawab pengelolaan

kawasan oleh pemegang izin harus dijalankan secara konsekuen. Kami sedang mendalami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hutan dan pemantauan satwa yang diterapkan di areal konsesi," kata Dwi Januanto Nugroho, Minggu (8/2/2026).

Ia menyebutkan, pemanggilan direksi PT RAPP dilakukan sebagai bagian dari pendalaman tanggung jawab pemegang izin dalam memenuhi kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendalaman tersebut mencakup efektivitas sistem pengamanan kawasan, pengelolaan High Conservation Value (HCV), serta keberadaan dan fungsi koridor satwa di dalam area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

"Kematian gajah di wilayah kerja perusahaan menjadi catatan serius bagi kami untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan High Conservation Value dan koridor satwa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Dwi. (wid,ist,kum/dya)

yang memungkinkan terjadinya perburuan liar. Ia menilai negara kerap bergerak reaktif, baru bertindak setelah insiden terjadi. Pola tersebut, menurut dia, harus segera diubah dengan pengawasan yang lebih aktif dan berkelanjutan.

"Negara tidak boleh hanya bergerak setelah adanya kejadian. Tetapi harus lebih aktif dalam pengawasan secara berkala. Pemerintah perlu segera melipatgandakan jumlah personel Polhut dan memperkuat pengawasan intensif di kawasan konservasi maupun konsesi rawan konflik dan perburuan liar," ujarnya.

Daniel memastikan Komisi IV DPR akan membahas secara khusus tindak lanjut kasus ini. Evaluasi terhadap sistem pengawasan satwa liar akan dilakukan, termasuk memastikan adanya langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kita akan bahas secara khusus tindak lanjut kasus ini, mengevaluasi sistem pengawasan, serta memastikan langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang," kata Daniel.

Sebelumnya, bangkai gajah Sumatera ditemukan di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Satwa tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa kepala dan gading, yang diduga kuat diambil oleh pemburu liar. (rla,gus,ist/dya)

BELAJAR DARI GEMPA PACITAN, WASPADA MEGATHRUST LEPAS ENERGI

Gempa megathrust berkekuatan Magnitudo 6,2 terjadi di wilayah Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat dini hari (6/2/2026). Dampak guncangannya meluas dan terasa hingga Bantul serta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian terbaru yang dirilis oleh para pakar dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2024, terungkap bahwa saat ini terdapat total 14 zona megathrust yang dapat memicu gempa besar serta tsunami. Waspada!

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menegaskan bahwa gempa Pacitan tersebut tergolong gempa megathrust. Kesimpulan itu didasarkan pada mekanisme sumber gempa yang menunjukkan pergerakan naik atau thrust fault, ciri khas aktivitas megathrust di zona selatan Pulau Jawa.

"Gempa Pacitan ini jenis gempa megathrust, yang tergambar dari mekanismenya yang berupa pergerakan naik (thrusting) dengan kedalaman dangkal," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, dikutip Minggu (7/2/2026).

Ia menambahkan, gempa tersebut patut disyukuri tidak berkembang hingga kekuatan yang lebih besar.

"Patut disyukuri bahwa gempa pacitan ini tidak mencapai magnitudo



7,0 karena dapat berpotensi tsunami," lanjut dia.

Getaran akibat gempa ini dirasakan cukup luas di berbagai wilayah Pulau Jawa. Daerah Bantul, Sleman, dan Pacitan tercatat mengalami intensitas IV MMI, di mana guncangan dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah.

Sementara itu, wilayah Kulon

FAKTA-FAKTA MEGATHRUST DI INDONESIA

Apa itu Megathrust?
Megathrust adalah Zona subduksi di mana lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua. Menjadi ancaman laten di area yang sudah lama tidak mengalami gempa besar.

- Data & Lokasi**
- 16 Titik: Jumlah total zona megathrust di Indonesia.
 - Potensi Maksimal: Megathrust Aceh-Andaman (M 9,2).
 - Zona Kritis: Selat Sunda (M 8,8) dan Mentawai-Siberut (M 8,7).

- Risiko Tsunami**
- 34 Meter: Jika segmen selatan Jawa, Sumatera, dan backthrust pecah bersamaan.
 - 1 Meter: Estimasi ketinggian tsunami yang bisa mencapai Jakarta jika Selat Sunda pecah.

- Mitigasi**
- Sistem: Peringatan dini InaTEWS ((Indonesia Tsunami Early Warning System).
 - Edukasi: Sosialisasi SLG dan masyarakat siaga tsunami.
 - Fasilitas: Pembangunan shelter evakuasi.



Gempa Lagi, 64 Bangunan Rusak di Tujuh Daerah

PACITAN dan sejumlah wilayah di Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami rangkaian gempa bumi dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas seismik tersebut mencakup gempa berkekuatan kecil hingga gempa bermagnitudo menengah yang berdampak pada kerusakan bangunan.

Gempa terkini berkekuatan Magnitudo 2,7 dilaporkan mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Minggu (8/2/2026). Guncangan terjadi sekitar pukul 17.26 WIB. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 8,95 Lintang Selatan dan 111,21 Bujur Timur. Gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada sekitar 86 kilometer arah tenggara, dengan kedalaman 19 kilometer di bawah permukaan.

BMKG menyebutkan bahwa informasi awal yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga data masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan hasil

analisis lanjutan.

Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa Magnitudo 2,7 tersebut. Pihak berwenang setempat masih melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan.

Sebelumnya, gempa berkekuatan lebih besar, yakni Magnitudo 6,2, mengguncang wilayah selatan Jawa Timur pada Jumat dini hari, 6 Februari 2026, sekitar pukul 01.06 WIB. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 8,98 Lintang Selatan dan 111,17 Bujur Timur, atau sekitar 89 kilometer selatan Pacitan, dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid Darlog) BPBD Jawa Timur, Satriyo Nurseno, menyampaikan bahwa gempa tersebut mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Pacitan.

"Korban jiwa satu orang di Kabupaten Pacitan. Korban memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan mengalami syok setelah kejadian gempa," ujar Satriyo.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Joko Santoso (53), warga Dusun Krajan Kidul RT 005/RW 002, Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

BPBD Jawa Timur mencatat dampak gempa Magnitudo 6,2 tersebut terjadi di tujuh daerah, yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Madiun, dan Tulungagung. Puluhan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.

Dampak gempa tidak hanya dirasakan di Jawa Timur, tetapi juga menjalar ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul melaporkan adanya korban luka akibat gempa tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan akan menanggung biaya pengobatan bagi warga yang mengalami luka akibat gempa Pacitan, termasuk korban yang harus menjalani perawatan inap di rumah sakit.

Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pembiayaan perawatan medis korban gempa.(gus,ist/dya)

Progo, Trenggalek, Wonogiri, Malang, Cirebon, Blitar, Surakarta, Karanganyar, Magelang, Jombang, Tulungagung, Ponorogo, Magetan, Nganjuk, Wonosobo, hingga Banjarnegara merasakan guncangan dengan skala intensitas III MMI, yang dianalogikan seperti getaran akibat truk besar melintas di depan rumah.

Adapun wilayah Tuban dan Jepara merasakan guncangan dengan intensitas II MMI, di mana getaran dirasakan oleh sebagian orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang.

Zona megathrust merupakan wilayah pertemuan antar-lempeng tektonik Bumi yang berada di zona subduksi, yakni area di mana satu lempeng bergerak menyusup ke bawah lempeng lainnya. Zona ini umumnya berada di dasar laut.

Megathrust dikenal memiliki potensi menghasilkan gempa berkekuatan besar dan dapat memicu tsunami dahsyat. Zona ini diperkirakan mengalami siklus pelepasan energi secara berulang dengan jeda waktu yang bisa mencapai ratusan tahun.(wid,rls,ant/dya)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menahan pemilik PT Blueray John Field (JF) selama 20 hari ke depan. John Field diketahui kabur saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Terkait info kemana kaburnya, KPK ogah membeberkannya.

KASUS SUAP IMPORTASI PT BLUERAY (FEBRUARI 2026)

KPK telah menetapkan enam tersangka

Tersangka dari Ditjen Bea Cukai:

- Rizal: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC.
- Sisprian Subiaksono: Kasubdit Intelijen P2 DJBC.
- Orlando Hamonangan: Kasi Intelijen DJBC.

Tersangka dari Pihak Swasta (PT Blueray):

- John Field: Pemilik PT Blueray (sempat kabur sebelum akhirnya menyerahkan diri).
- Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi.
- Dedy Kurniawan: Manajer Operasional.

Temuan dan Barang Bukti Utama

- Uang & Logam Mulia: Penyidik menyita total barang bukti senilai kurang lebih Rp40,5 miliar, termasuk uang tunai dalam berbagai valuta asing dan emas seberat 5,3 kg (terbagi dalam dua klaster emas 2,5 kg dan 2,8 kg)
- Modus "Jatah" Bulanan: Terungkap adanya dugaan setoran rutin senilai Rp7 miliar per bulan dari pihak swasta kepada oknum pejabat Bea Cukai untuk memuluskan masuknya barang-barang tanpa pemeriksaan semestinya.
- Manipulasi Jalur: Persekongkolan ini diduga telah dimulai sejak Oktober 2025 dengan memanipulasi sistem agar barang masuk melalui jalur yang lebih longgar.

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali membuka persoalan lama yang tak kunjung selesai. Seorang pejabat Bea Cukai yang baru delapan hari dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi terkait importasi barang.

Pejabat tersebut, Rizal, dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026. Namun dalam perkara yang diusut KPK, Rizal didudukkan dalam kapasitas jabatannya sebelumnya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026.

"Saudara RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 sampai dengan Januari

AKHIRNYA BOS BLUERAY DITAHAN, KPK OGAH BEBERKAN JEJAK PELARIAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menahan informasi mengenai jejak pelarian pemilik PT Blueray, John Field, dalam perkara dugaan suap kegiatan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Lembaga antirasuah beralasan informasi tersebut masuk dalam substansi materi penyidikan yang bersifat rahasia.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemilik PT Blueray, John Field (JF), terkait perkara dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. (Dok)

"Termasuk materi penyidikan yang masih didalami. Belum bisa disampaikan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dihubungi, Minggu (8/2/2026).

Penutupan informasi ini muncul di

tengah sorotan publik setelah John Field sempat melarikan diri saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. John Field baru menyerahkan diri pada Sabtu dini hari, 7 Februari 2026, dan

Baru 8 Hari Dilantik Purbaya, Soroti Pembiaran Sistemik

2026," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Dalam operasi senyap yang digelar Rabu, 4 Februari 2026, KPK mengamankan 17 orang dan menetapkan enam tersangka. Selain Rizal, dua pejabat Bea Cukai lain yang ditetapkan tersangka adalah Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono serta Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, serta Manajer Operasional Dedy Kurniawan.

KPK menyatakan perkara ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Dari penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman para tersangka, penyidik menyita barang bukti dengan total nilai mencapai Rp40,5 miliar.

Barang bukti tersebut antara lain uang tunai rupiah Rp1,89 miliar, dolar

Amerika Serikat US\$182.900, dolar Singapura Sin\$1,48 juta, yen Jepang JPY550.000, logam mulia seberat total 5,3 kilogram senilai lebih dari Rp15 miliar, serta sebuah jam tangan mewah.

Kasus ini juga menyeret dugaan keberadaan rumah aman atau safe house yang digunakan untuk menyimpan uang dan barang berharga hasil kejahatan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut rumah tersebut diduga sengaja disewa dan digunakan oleh oknum pegawai Bea Cukai dalam menjalankan praktik ilegal.

"Diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam," kata Budi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui keberadaan informasi terkait safe house tersebut. Menurut dia, praktik semacam itu lazim dalam operasi ilegal yang berusaha menghindari deteksi aparat.

"Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul enggak terdeteksi siapapun itu," ujar Purbaya di Jakarta. (wid,rla,kum)

langsung menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membantah adanya upaya perintangan dalam operasi tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum kepolisian. Menurut Asep, pelaksanaan OTT berjalan tanpa hambatan berarti.

"Apakah dalam proses kemarin ada pihak-pihak yang merintangi? Sejauh ini tidak ada. Aman-aman saja, kita melaksanakan tugas berjalan dengan baik," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Ia menyebutkan ucapan terima kasih yang disampaikan KPK kepada sejumlah pihak semata-mata ditujukan untuk menjaga kenyamanan pelaksanaan tugas di lapangan.

"Baik pihak kami sebagai penyidik maupun rekan-rekan yang ada di sana," kata Asep.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 17 orang dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan pejabat Bea dan Cukai, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026, Rizal; mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono; serta mantan Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan.

Selain itu, KPK juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Blueray, John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; serta Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

KPK mengungkap konstruksi perkara dalam kasus ini bermula dari pengaturan jalur merah dalam proses importasi barang. Jalur merah yang seharusnya mewajibkan pemeriksaan fisik barang impor diduga dikondisikan agar tidak berfungsi, sehingga kepentingan importir tertentu dapat diloloskan.

Pengkondisian tersebut diduga dilakukan oleh Orlando Hamonangan bersama Sisprian Subiaksono, dengan melibatkan Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC saat itu. Skema ini diarahkan untuk kepentingan PT Blueray yang dimiliki John Field. (tin,ist,dya/wid)

Seleksi 3 Kepala Dinas Pemkab Malang: Diminati Pendaftar Luar Pulau Jawa



Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiard Anwar. (dok. Ist)

MALANG - Tiga kursi kosong kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang siap diisi. Menariknya, proses seleksi terbuka (selter) tidak hanya diminati aparatur sipil negara (ASN) setempat, ada juga pendaftar dari luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Sumatera Utara.

MLG/1/2026.

Sebagai Ketua Selter, Budiard menjelaskan, meskipun terdapat 5 kursi kepala dinas yang kosong, pada awal tahun 2026 ini Pemkab Malang baru dapat membuka pengisian untuk 3 jabatan. Hal tersebut, katanya,

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiard, mengatakan proses pendaftaran akan segera ditutup pada 9 Februari 2026 besok. "Sepertinya ada dari luar Jawa juga, dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Jadi bebas, orang luar juga boleh," ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Diketahui, pendaftaran seleksi terbuka itu telah diumumkan secara resmi sejak Senin (26/1/2026) melalui Surat Pengumuman Nomor 2/PANSEL/JPTP-

berkaitan dengan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Karena ini kan mengajukan ke BKN. Jadi turunnya dari BKN masih hanya tiga itu. Untuk posisi Kepala Satpol PP, Kepala DLH, dan Disperindag. Semua yang mengatur kan BKN," ungkap Budiard.

Ditegaskannya, proses pengisian jabatan kepala dinas tidak bisa dilakukan sembarangan karena seluruh tahapan terpantau melalui sistem yang terintegrasi dengan BKN. "Kalau kami menempatkan orang, BKN juga tahu. Jadi tidak bisa main-main lagi, karena ada aplikasinya," katanya.

Menanggapi isu makelar atau calo jabatan yang kerap mencuat dalam proses pengisian jabatan, Budiard memastikan panitia seleksi bekerja secara terbuka dan adil. "Situasi sekarang, siapa yang berani," ucapnya.

Terkait persyaratan, Budiard menyampaikan pelamar harus memenuhi kualifikasi kepangkatan dan riwayat pendidikan serta pelatihan kepemimpinan. Untuk jabatan kepala dinas, pangkat minimal

yang dipersyaratkan adalah golongan IV A atau IV B.

"Kalau pangkat kan harus sudah memenuhi syarat, ya. Kalau misalnya dia ambil kepala dinas berarti memang pangkatnya sudah harus sesuai yang dia tuju. IV A atau IV B kan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah, mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 4 pendaftar.

Dirincinya, satu orang mendaftar untuk jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 3 orang untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Dua di antaranya berasal dari kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ini artinya pengisian jabatan di Pemkab Malang mulai mendapat perhatian dari aparatur sipil negara lintas daerah," kata Nurman.

Namun demikian, Nurman mengaku belum dapat mengumumkan identitas para pendaftar karena masa pendaftaran masih berlangsung hingga 9 Februari 2026. (Santi/Dya)

Ketua DPRD Singgung Potensi Wisata Religi Kota Malang Usai Harlah 1 Abad NU

MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai Kota Malang memiliki potensi wisata religi. Pernyataan ini muncul setelah sekitar 107 ribu jamaah Nahdlatul Ulama (NU) menghadiri Mujahadah Kubro puncak Harlah 1 Abad NU di Stadion Gajayana pada 7-8 Februari 2026.

"Harapan kami ke depannya Kota Malang bisa menjadi daerah yang siap menerima kegiatan-kegiatan yang levelnya sudah bisa dibilang nasional. Bisa untuk seluruh Indonesia. Karena alhamdulillah terfasilitasi dengan baik," ujar Amithya, Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, kelancaran pelaksanaan Mujahadah Kubro menjadi titik awal yang baik bagi Kota Malang untuk mempersiapkan diri menghadapi kegiatan-kegiatan serupa yang tidak lagi berskala regional, melainkan nasional.

Selama ini, Kota Malang dikenal terus mengembangkan konsep sport tourism sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata. Namun

melalui kegiatan keagamaan berskala besar ini, Amithya melihat adanya peluang baru yang dapat dikembangkan, yakni wisata religi.

"Sebetulnya potensi ke arah sana ada, yakni untuk menjadi wisata religi. Kalau harapan kami itu bisa menjadi salah satu potensi," katanya.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menegaskan keberhasilan kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan, khususnya dalam menyambut tamu atau jamaah dari luar daerah dalam jumlah besar.

"Sesukses apa pun kegiatan, pastinya nanti ke depannya ingin melayani lebih baik lagi. Ada hal-hal yang bisa kita sempurnakan untuk bisa melayani para wisatawan religi ke depannya," ungkap Mia.

Diharapkannya, ke depan Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai kota pariwisata dengan ragam kuliner khasnya, tetapi juga dapat menambah satu bidang baru dalam sektor religi

sebagai bagian dari penguatan identitas kota.

Sebagai informasi, jamaah NU dari 45 PCNU se-Jawa Timur mulai berdatangan ke Stadion Gajayana sejak Sabtu (7/2/2026) malam untuk mengikuti rangkaian Mujahadah Kubro. Meski sempat diguyur hujan, rangkaian kegiatan tetap berjalan lancar dan kondusif.

Sejumlah tokoh PBNU dan tokoh nasional turut hadir dan bershalawat bersama jamaah, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto, Rais 'Aam PBNU, Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal PBNU, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Termasuk juga Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Jawa Timur yang



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, serta Ketua PP Muslimat NU yang juga menjabat Menteri PPPA.

Turut hadir pula Ketua PWNU Jawa Timur serta 3 kepala daerah di wilayah Malang Raya sebagai tuan rumah kegiatan. (Santi/Dya)

SAMA-SAMA GELAR PEMILU: JEPANG MANTAPKAN KEKUASAAN, THAILAND BISA BUNTU

Di Jepang, 1.284 politisi memperebutkan seluruh 465 kursi di DPR. Pemilu dini ini menjadi upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi memperkuat mandat kekuasaan di tengah tekanan ekonomi dan agenda belanja besar. Sementara di Thailand, 5.089 orang memperebutkan 500 kursi DPR. Di Negeri Gajah Putih kontestasi serentak dengan referendum konstitusi justru membuka kembali risiko parlemen terfragmentasi, koalisi rapuh, dan kebuntuan pemerintahan yang telah berulang selama dua dekade terakhir.

Jepang dan Thailand sama-sama menggelar pemilu pada Minggu (8/2/2026). Hasil di kedua negara bisa berbeda. Politik dinasti dan nepotisme mewarnai kedua pemilu itu.

Di Jepang, 1.284 politisi memperebutkan seluruh 465 kursi di DPR. Sementara di Thailand, 5.089 orang memperebutkan 500 kursi DPR. Selain kursi DPR, pemilu Thailand sekaligus referendum soal perubahan konstitusi.

Pemilu Jepang ditetapkan pada 19 Januari 2026, kala Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan akan membubarkan parlemen dan menggelar pemilu. Parlemen dibubarkan pada 23 Januari 2026. Alasannya, antara lain, memperkuat mandat pemerintah.

Kini, Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi cuma



Masyarakat di seluruh Jepang menantang salju untuk memilih dalam pemilu pertengahan musim dingin pertama di negara itu dalam 36 tahun, Minggu (8/2/2026). (Dok.BBC)

menduduki 191 kursi dan mitra koalisinya, Japan Ishin atau Partai Inovasi Jepang (JIP), mengendalikan 38 kursi. Dengan demikian, total kursi koalisi itu cuma menduduki 229 kursi.

Padahal, untuk menjadi mayoritas, pemerintah perlu partai atau koalisi partai yang menduduki sekurangnya 233 kursi di majelis rendah. Agar stabil, menurut

Mainichi Shimbun, partai atau koalisi partai pendukung pemerintah perlu menduduki 243 kursi. Dengan demikian, seluruh 17 komisi di majelis rendah parlemen Jepang bisa dipimpin pemerintah.

Bahkan, akan lebih baik lagi kalau pemerintah menguasai 261 kursi di DPR atau dikenal sebagai mayoritas absolut. LDP bersama Komeito pernah mendapat kursi sebanyak ini pada 2021.

Pemerintah juga butuh dukungan dari 310 anggota majelis rendah kalau mau menyetujui rancangan perubahan konstitusi. Para PM Jepang dari LDP sudah lebih dari 10 tahun mendorong perubahan ini. Usaha itu selalu gagal karena kekurangan dukungan di majelis rendah ataupun majelis tinggi.

Pemilu kali ini menjadi yang pertama kali setelah bertahun-tahun LDP tidak bersama Komeito. Mitra LDP itu kini berkongsi dengan Partai Demokrasi Konstitusional (CDP).

Pemilu kali ini akan menguji kepemimpinan Takaichi dan kemampuan Japan Ishin memperluas basis dukungan ke luar Osaka. Selama ini, JIP mendapatkan kursi dari kemenangan di Osaka dan sekitarnya saja.

Sebagian politisi, seperti dilaporkan Japan Times, kesulitan berkampanye. Sebab, periode kampanye kali ini bersamaan dengan ujian masuk sekolah. Para kandidat tak bisa menggunakan pelantang seperti lazimnya di pemilu. Sebab, mereka khawatir mengganggu proses ujian masuk sekolah.

"Saya mau dikenal dan dipilih. Walakin, saya benar-benar tak mau mengganggu pelajar yang sedang seleksi masuk sekolah," kata seorang politisi yang tak diungkap identitasnya.

Kondisi itu terutama membatalkan politisi yang baru pertama kali ikut pemilu. Di sisi lain, mereka juga sadar tidak mau jadi musuh masyarakat karena kampanye yang mengganggu persiapan dan pelaksanaan seleksi masuk sekolah.

Setiap warga Jepang berusia 18 tahun atau lebih tua dapat memilih. Walakin, keputusan Takaichi menggelar pemilu pada musim ujian masuk sekolah memicu kejengkelan di kalangan pemilih muda dan orangtua yang anaknya mau masuk sekolah. (afp,rtr;ist/dya)

Dari Pilot hingga Taipan Teknologi Berebut Kursi PM



Pemilu di TPS di Wat That Thong di Bangkok Minggu (8/2/2026). (Dok.CNA)

JUTAAN warga Thailand mendatangi tempat pemungutan suara pada Minggu (8/2/2026), untuk mengikuti pemilihan umum nasional. Pemilu ini menjadi yang ketiga dalam kurun dua tahun terakhir, mencerminkan instabilitas politik yang terus membayangi Negeri Gajah Putih.

Kontestasi elektoral tersebut digelar setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pada Desember 2025. Langkah itu menandai babak baru dalam perjalanan politik Thailand, sekaligus menjadi titik krusial bagi pemulihan ekonomi negara dengan

perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, yang terdampak berkepanjangan oleh gejolak politik dan pergantian pemerintahan.

Pemilu kali ini mempertemukan dua arus besar kekuatan politik yaitu kelompok reformis yang mendorong perubahan struktural dan pembaruan sistem, berhadapan dengan aliansi konservatif yang hingga kini masih menguasai kendali pemerintahan dan institusi-institusi strategis negara.

"Kami membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara," ujar Yuernyong Loonboot, 64 tahun, seorang pemilih yang ditemui di tempat pemungutan suara di Buriram, daerah asal Anutin Charnvirakul, seperti dikutip AFP.

Ia menambahkan, situasi keamanan di wilayah perbatasan membuatnya diliputi kecemasan. "Tinggal di sini, konflik perbatasan membuat saya resah. Perang bukan sesuatu yang biasa kami pikirkan," ujarnya.

Pemilu ini menjadi arena persaingan bagi tiga figur utama yang membidik posisi perdana menteri. Salah satunya adalah Natthaphong Ruengpanyawut, ketua Partai Rakyat (People's Party) yang berhaluan progresif.

Natthaphong, pengusaha berusia 38 tahun dan mantan eksekutif perusahaan penyedia layanan komputasi awan, menuliskan dalam akun LinkedIn pribadinya bahwa ia memiliki visi untuk "menciptakan inovasi demi kemanusiaan yang lebih baik."

Ia juga mengungkapkan ambisinya membangun perusahaan teknologi yang kelak bisa menjadi "Google-nya Thailand."

Sejumlah jajak pendapat menempatkan Partai Rakyat sebagai peserta dengan elektabilitas tertinggi menjelang pemungutan suara.

Namun, kekuatan reformis kerap dipersepsikan sebagai ancaman oleh kelompok konservatif yang masih dominan dalam struktur kekuasaan Thailand. Partai ini tercatat telah dua kali dibubarkan dalam perjalanan politiknya. (afp,gus,ist/dya)

ISI PIRING MAKANMU, CERMIN MASA DEPAN KULITMU

Penuaan seringkali dianggap sebagai takdir biologis yang hanya ditentukan oleh angka di kartu identitas.

Namun, penelitian terbaru di bidang dermatologi dan nutrisi mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan yaitu piring makan Anda adalah cermin masa depan kulit Anda.

Fenomena penuaan dini kini bukan lagi sekadar masalah kosmetik, melainkan sinyal adanya kerusakan sistemik pada sel, jaringan, dan organ tubuh akibat pola makan yang keliru.

Di tengah gempuran makanan cepat saji dan gaya hidup serba instan, tubuh kita seringkali terpapar oleh senyawa jahat bernama AGEs (Advanced Glycation End-products). Senyawa ini terbentuk ketika protein atau lemak bergabung dengan gula dalam aliran darah.

Akibatnya, serat kolagen yang seharusnya lentur menjadi kaku dan rapuh, memicu kerutan, garis halus, hingga hilangnya volume wajah

yang membuat seseorang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya.

Gorengan

Gorengan seperti kentang goreng atau burger mungkin terasa memuaskan di lidah, namun mereka adalah "bom waktu" bagi elastisitas jaringan. Menurut Kseniya Kobets, MD, ahli dermatologi kosmetik, makanan olahan kehilangan hampir seluruh kapasitas antioksidannya. Tanpa antioksidan, tubuh kehilangan perisai untuk melawan radikal bebas, sehingga proses perbaikan luka dan regenerasi sel kulit terhenti.

Jerat Manis 'Sugar Rush'

Gula adalah katalisator utama pembentukan advanced glycation end products (AGEs), senyawa berbahaya yang terbentuk ketika molekul gula berikatan dengan protein atau lemak dalam tubuh. Konsumsi gula yang tinggi seperti dari donat, minuman bersoda, hingga kopi kekinian dengan tambahan sirup dan krim—tidak hanya merusak tekstur dan elastisitas kulit secara langsung, tetapi juga memberi tekanan besar pada sistem metabolisme. Dampaknya tidak berhenti pada tampilan kulit semata. Asupan gula berlebih turut memengaruhi kesehatan kardiovaskular, meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah serta kerja jantung dalam jangka panjang. Obesitas yang dipicu oleh pola makan tinggi gula menciptakan kondisi peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuh, yang sering kali tidak disadari namun

berlangsung terus-menerus. Peradangan kronis ini mempercepat degradasi sel di seluruh organ, mengganggu proses regenerasi alami, dan membuat tubuh lebih rentan terhadap penuaan dini serta berbagai penyakit degeneratif.

Bahaya di Balik Aroma 'Smoky'

Daging panggang yang sampai gosong memang memiliki aroma menggoda, namun bagian hitam tersebut mengandung amina heterosiklik. Memasak pada suhu ekstrem tidak hanya merusak nutrisi makanan tetapi juga menciptakan zat yang bersifat pro-inflamasi. Kerak hitam pada makanan adalah sumber AGEs murni yang langsung menyerang kekenyalan kulit Anda.

Natrium Bisa Curi Kelembaban Sel

Garam atau natrium dalam dosis tinggi menyebabkan retensi air yang membuat wajah tampak bengkak (puffy). Lebih dari itu, pada tingkat seluler, natrium berlebih memicu stres oksidatif. Ketidakseimbangan ini merusak DNA sel dan menghambat kemampuan kulit untuk menghidrasi dirinya sendiri secara alami dari dalam.

Mentega dan Lemak Trans

Mentega tinggi akan lemak jenuh yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dan memicu peradangan sistemik di dalam tubuh.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jantung, tetapi juga berpengaruh pada kualitas jaringan dan sel, termasuk sel kulit. Selain itu, mentega memiliki titik asap (smoke point) yang relatif rendah.

Ketika digunakan untuk menumis atau memasak pada suhu tinggi, mentega mudah teroksidasi dan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang dapat menyerang

membran sel kulit, mengganggu fungsi pelindung alaminya, serta mempercepat proses penuaan dan kerusakan sel secara bertahap. (tim Uinsa berkontribusi dalam tulisan ini)

Cara Melawan Penuaan dari Dapur

Low & Slow:

Pilih metode memasak bersuhu rendah untuk mengurangi pembentukan AGEs.

Antioksidan Alami:

Perbanyak buah berwarna cerah dan sayuran hijau untuk melawan peradangan kulit.

Hidrasi Cerdas:

Ganti minuman manis dengan air putih, infused water, atau teh hijau.

Lemak Sehat:

Gunakan minyak zaitun atau alpukat sebagai pengganti mentega.



Logam Diduga dari Luar Angkasa Ditemukan Ditumpukan Harta Karun Kuno



Peneliti arkeolog menemukan sepasang artefak logam yang tidak biasa dalam tumpukan harta karun kuno dari zaman perunggu di Semenanjung Iberia, yang ternyata berasal dari luar angkasa.

Diantara puluhan objek berkilau yang sebagian besar terbuat dari emas, sebuah gelang berkarat dan sebuah belahan bola berongga berlapis emas menarik perhatian karena komposisinya yang berbeda dari logam biasa yang ditambang di bumi.

Dua artefak itu ditemukan sebagai bagian dari harta karun Villena, sebuah koleksi yang berjumlah puluhan benda dan pertama kali digali pada tahun 1963 di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Alicante, Spanyol.

Koleksi ini selama puluhan tahun dianggap sebagai salah satu contoh paling penting dari keahlian perhiasan emas di Eropa pada periode tersebut. Para ilmuwan yang memimpin analisis meneliti gelang kusam dan belahan bola berongga tersebut dengan teknik

spektrometri untuk menentukan komposisinya.

Mereka menemukan bahwa kedua benda itu terbuat dari besi meteorit, logam yang berasal dari meteorit yang jatuh ke Bumi, bukan dari tambang lokal.

Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Zaman Perunggu lebih dari 3.000 tahun lalu mungkin sudah memanfaatkan material luar angkasa dalam pembuatan artefak mereka.

Penelitian yang dipublikasikan oleh Salvador Rovira-Llorens, mantan kepala konservasi Museum Arkeologi Nasional Spanyol, dan timnya menerbitkan hasilnya dalam sebuah makalah ilmiah pada 2024.

Temuan ini memberikan wawasan



baru tentang tingkat

kemajuan teknik pengolahan logam pada masa itu, yang sebelumnya diperkirakan belum memasuki penggunaan besi secara luas di wilayah Iberia.

Usia artefak-artefak ini, diperkirakan sekitar 1.400 hingga 1.200 SM, menunjukkan bahwa logam meteorit telah digunakan sebelum periode zaman besi secara umum dimulai di Eropa. Studi lebih lanjut terhadap komposisi dan teknik pembuatannya dapat

memperdalam pemahaman tentang hubungan manusia kuno dengan material luar angkasa dan peranannya dalam budaya kuno. (Nabilla – UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Penemuan Terbaru Terkait Benda Luar Angkasa (per Januari 2026)

Objek antarbintang 3I/ATLAS menjadi objek antarbintang ketiga yang terdeteksi manusia, dengan ukuran inti sangat besar dan pelepasan gas metana yang tidak biasa.

Molekul sulfur organik terbesar ditemukan di ruang antarbintang dan dinilai sebagai mata rantai penting dalam proses kimia pembentuk awal kehidupan.

Planet pengembara seukuran Saturnus ditemukan melayang tanpa bintang induk, dengan massa yang untuk pertama kalinya diukur secara langsung.

Komet C/2026 A1 (MAPS) menjadi komet pertama yang terdeteksi pada 2026 dan berpotensi tampak sangat terang saat mendekati Matahari.

Awan gas misterius terdeteksi di luar angkasa dan diduga menyembunyikan planet baru, memicu kajian tentang pembentukan planet di lingkungan ekstrem. (*)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Bibir Blur hingga Efek Multichrome Jadi Trend Makeup 2026

Tahun 2026 Makeup kembali menjadi media ekspresi. Dari tampilan estetika yang minimalis menjadi tampilan yang lebih berani, eksperimental, dan tetap menyatu dengan kulit asli.

Mulai dari editorial global, warna yang intens, tekstur yang futuristik, dan detail personal yang mendominasi wajah para model yang terlihat sangat jelas pada panggung New York Fashion Week.

Tahun 2026 disebut-sebut sebagai tahun kebangkitan makeup yang tidak lagi seragam, namun menonjolkan karakter dan kebebasan berekspresi.

Natural glam

dalam trend makeup 2026 meskipun warna dan tekstur semakin berani trend makeup ini justru lebih bergerak ke arah yang lebih realistis dan halus. Makeup artist Kyle Andreson mengatakan pendekatan pada skin-first masih bertahan, tetapi saat ini dilengkapi dengan sentuhan yang glam dan yang lebih modern dan terkontrol. "Kita sudah meninggalkan minimalisme ekstrem, sekarang kulit terlihat alami tetapi dipoles secara strategis," ujar Anderson kepada cosmopolitan.

Trend ini sama dengan prediksi menurut Vogue Arabia yang menyebut complexion 2026 yang mengarah pada elevated base, yaitu kulit yang sehat dan mempunyai tekstur yang nyata, bukan kilap yang berlebihan.

Blur Lips

garis bibir yang tegas mulai ditinggalkan, dan digantikan oleh bibir dengan mempunyai efek blur, lembut, dan terlihat seperti warna yang alami dan warnanya sedikit luntur. Andreson menyebut trend ini sebagai "Makeout

lips", dimana "lip liner" dibaurkan sehingga warna bibir terlihat lebih hidup, sensual dan tidak terlihat kaku. Penerapan ini mencerminkan pergeseran dari makeup yang lebih terasa lived-in atau lebih hidup dan bukan makeup yang presisi.

Eyeshadow multichrome

Menjadi penanda kembalinya riasan mata yang lebih berani dan eksploratif di tahun 2026, setelah beberapa tahun terakhir didominasi oleh palet warna netral dan tampilan yang cenderung aman. Tren ini menandai pergeseran ke arah ekspresi yang lebih bebas, di mana permainan warna dan efek cahaya kembali mendapat sorotan utama dalam dunia makeup.

Dikutip dari InStyle, maskara berwarna cerah, eyeshadow multichrome, serta efek shimmer bernuansa kosmik akan menjadi elemen kunci yang membentuk tampilan mata. Perpaduan ini menghadirkan dimensi baru pada riasan, dengan hasil akhir yang dinamis dan mampu menangkap cahaya dari berbagai sudut, sehingga mata terlihat lebih hidup dan ekspresif.

CEO sekaligus makeup artist Danessa Myricks menyebut bahwa perubahan warna pada area mata merupakan cara paling mudah untuk memberikan kesegaran pada wajah tanpa harus mengubah keseluruhan tampilan makeup. Menurutnya, permainan warna dapat langsung menggeser kesan dan karakter riasan. "Mengganti maskara hitam dengan biru atau plum bisa langsung mengubah karakter wajah," ujar Myricks, menegaskan bahwa sentuhan kecil pada riasan mata dapat memberikan dampak visual yang signifikan.

Y3K dan nuansa futuristik

Menjadi benang merah tren makeup pada 2026, memadukan nostalgia awal tahun 2000-an dengan sentuhan teknologi serta imajinasi visual khas masa depan. Estetika ini tidak lagi sekadar bermain pada warna mencolok, tetapi juga pada efek visual yang terasa digital, eksperimental, dan sarat unsur inovasi.

Andreson menyebut pengaruh kecerdasan buatan (AI) dan visual digital sebagai faktor pendorong utama munculnya elemen shimmer, lipstick frosted, serta eyeliner grafis yang terlihat modern dan presisi.

Tampilan ini mencerminkan pergeseran makeup sebagai medium ekspresi artistik yang terinspirasi dari dunia virtual dan teknologi. Tren tersebut juga terlihat dari meningkatnya popularitas highlighter krom, eyeshadow duochrome, hingga tekstur holografik yang mampu memantulkan cahaya dari berbagai sudut. Efek multidimensi ini memberikan kesan futuristik yang kuat sekaligus menghadirkan tampilan yang lebih berani dan eye-catching.

Layering blush

tetap menjadi elemen penting dalam tren 2026, namun dengan pendekatan yang lebih berlapis dan fleksibel. Myricks menyamakan tren layering blush dengan layering parfum, di mana satu warna berani dipadukan dengan shade netral agar hasilnya tetap wearable. Teknik ini memberi ruang bagi wajah untuk bereksplorasi tanpa kehilangan keseimbangan.

Bagi pencinta tampilan simpel, konsep minimalism with a twist tetap mendapat tempat di tahun 2026. Menurut Drita Paljevic dari Kevyn Aucoin Beauty,

kulit yang bersih dan alis rapi akan dipadukan dengan satu detail yang mencolok, seperti garis liner grafis

atau bibir burgundy dengan tekstur lembut.

Keseluruhan tren ini menegaskan bahwa makeup di 2026 bukan tentang tampil berlebihan, melainkan tentang pilihan yang dibuat secara sadar, personal, dan mencerminkan karakter masing-masing individu. (Itqiyah_UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



Baru Dilantik, Adies Kadir...dari hal 1

Setelah resmi dilantik pada Kamis (5/2/2026), Adies Kadir langsung mengikuti sidang perdana Mahkamah Konstitusi pada Jumat (6/2/2026) pagi. Ia tergabung dalam Panel II yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra. Panel ini menyidangkan enam permohonan uji materi undang-undang, dengan agenda perbaikan pokok-pokok permohonan

Sidang dimulai pukul 07.30 WIB dan berlangsung sekitar 23 menit. Perkara yang diperiksa antara lain pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan nomor perkara 2/PUU-XXIV/2026, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan nomor 8/PUU-XXIV/2026, serta Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan nomor 14/PUU-XXIV/2026.

Di akhir sesi pertama, Saldi Isra sempat menyinggung kehadiran Adies sebagai hakim konstitusi baru. "Tiga permohonan ini beruntung (karena) kita dihadiri oleh hakim konstitusi baru, Pak Adies Kadir. Dan, ini pertama duduk di ruangan ini dan bertemu dengan tiga permohonan ini," kata Saldi sebelum menutup persidangan.

Namun, pada hari yang sama, laporan etik terhadap Adies telah lebih dulu disampaikan ke MKMK. Laporan tersebut diajukan oleh 21 guru besar, dosen, dan praktisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS). Mereka menilai Adies diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, terutama terkait proses pencalonannya sebagai hakim MK.

Perwakilan CALS, dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan bahwa laporan itu diajukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Mahkamah Konstitusi. Menurut Yance, persoalan utama terletak pada proses seleksi Adies yang dinilai tidak sejalan dengan hukum dan etika.

"Kami melaporkan Bapak Adies Kadir karena seleksinya itu tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tapi juga kami melihat banyak hal yang tidak pantas terjadi dalam proses itu yang merupakan pelanggaran terhadap beberapa norma etika," ujar Yance.

CALS meminta MKMK untuk memperluas yurisdiksinya, tidak hanya memeriksa perilaku hakim setelah menjabat, tetapi juga mengoreksi proses seleksi yang dinilai tidak etis. Yance menyatakan, meski MKMK selama ini memeriksa laporan terhadap hakim yang telah menjabat, proses pencalonan yang bermasalah

juga patut diuji secara etik.

Salah satu poin yang disorot adalah perubahan calon hakim konstitusi pengganti Arief Hidayat. Pada awalnya, Komisi III DPR RI menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Namun, pada Januari 2026, keputusan itu dianulir dan DPR justru mengusulkan Adies Kadir.

Menurut Yance, perubahan tersebut tidak sejalan dengan prinsip integritas, imparialitas, dan kesopanan. Apalagi, Adies sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, lembaga yang terlibat langsung dalam proses seleksi tersebut.

"Seakan-akan Pak Adies Kadir mendapatkan privilese dalam proses seleksi, bahkan dia bisa menganulir putusan komisi yang sebelumnya sudah mengusulkan orang lain, tiba-tiba untuk mengusulkan dirinya, dan dia tidak menolak untuk diusulkan dalam mekanisme yang sebenarnya cacat secara prosedur hukum," kata Yance.

CALS juga menilai pencalonan Adies melanggar Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Yance meyakini Adies mengetahui bahwa proses pencalonannya bertentangan dengan ketentuan hukum.

Selain persoalan prosedur, CALS menyoroti potensi konflik kepentingan Adies yang memiliki latar belakang sebagai politisi. Menurut mereka, posisi tersebut berpotensi memengaruhi independensinya dalam memeriksa perkara, baik pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu.

"Dalam konteks seperti itu, beliau tidak bisa ikut dalam pengujian undang-undang yang mana Partai Golkar punya kontribusi besar di situ, atau sengketa pilpres, atau sengketa PHPU, lalu untuk apa beliau menjadi hakim konstitusi?" ujar Yance

Atas dasar itu, CALS meminta MKMK memberhentikan Adies Kadir dari jabatan hakim konstitusi sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kerusakan institusional Mahkamah Konstitusi ke depan. Selain melapor ke MKMK, CALS juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu dekat.

Di luar laporan terhadap Adies, isu rekrutmen hakim konstitusi juga memicu respons dari organisasi masyarakat sipil lain. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan Mahkamah Agung agar berhati-hati dalam proses seleksi calon hakim konstitusi dari

unsur MA. Peringatan itu disampaikan dengan berkaca pada polemik pencalonan Adies Kadir serta rekam jejak etik hakim konstitusi sebelumnya.

Dalam siaran persnya, YLBHI menegaskan bahwa calon hakim konstitusi yang diajukan MA tidak boleh sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi harus benar-benar independen, berintegritas, dan mampu menjadi teladan. "Dalam memilih calon hakim konstitusi, MA juga perlu menjadikan kompetensi dan integritas calon sebagai pertimbangan utama kelulusan," tulis YLBHI dikutip Minggu (8/2/2026).

YLBHI juga menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia bagi calon hakim konstitusi, mengingat banyak perkara di MK bersinggungan langsung dengan hak-hak dasar warga negara. Menurut YLBHI, perspektif hakim dalam memandang HAM akan berpengaruh besar terhadap kualitas perlindungan hak warga negara.

Desakan tersebut, menurut YLBHI, menjadi semakin mendesak di tengah sorotan publik terhadap lembaga peradilan, termasuk kasus-kasus etik yang menimpa hakim dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai, pilihan MA terhadap hakim konstitusi berikutnya merupakan pertarungan besar bagi reputasi lembaga peradilan.(gus,rls,kum/dya)

MKMK Disebut Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan

PELAPORAN Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memunculkan perdebatan baru mengenai batas kewenangan lembaga etik tersebut. Di tengah desakan 21 akademisi dan praktisi hukum yang meminta pembatalan pengangkatan Adies sebagai hakim konstitusi, pakar hukum tata negara Prof. Henry Indraguna menilai tuntutan itu keliru secara konstitusional.

Menurut Henry, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan pengangkatan hakim yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Ia menegaskan MKMK bukan lembaga yudisial, melainkan organ etik yang ruang geraknya terbatas pada penilaian perilaku hakim setelah menjabat. "MKMK hanya memiliki kewenangan menilai etik perilaku hakim, bukan keabsahan administrasi pengangkatan," kata Henry, Minggu (8/2/2026).

Henry menyampaikan pandangan tersebut untuk menanggapi laporan yang diajukan 21 guru besar, dosen, dan praktisi hukum ke MKMK.

Kelompok yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) itu mempersoalkan proses pencalonan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR.

Mereka menilai mekanisme yang ditempuh tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Namun, bagi Henry, argumentasi tersebut tidak cukup untuk menggugurkan status pengangkatan Adies. Ia menyebut pengisian jabatan hakim konstitusi oleh DPR merupakan mandat langsung konstitusi. Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan sembilan hakim konstitusi diajukan masing-masing oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. "Kewenangan DPR ini adalah mandat konstitusional, bukan kewenangan delegatif," ujarnya.

Henry juga menepis anggapan bahwa DPR melanggar hukum dengan mengganti calon hakim yang sebelumnya telah disetujui. Menurut dia, tidak ada norma yang melarang DPR mengganti calon sepanjang belum diangkat oleh Presiden. Baik UUD 1945

maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kata Henry, tidak mengatur mekanisme seleksi secara kaku dan imperatif.

Terkait Pasal 19 Undang-Undang MK yang mengatur asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, Henry menilai ketentuan tersebut bersifat prinsipil. "Itu guiding principles, bukan norma yang jika dilanggar otomatis membatalkan pengangkatan," katanya. Dalam doktrin hukum administrasi negara, pelanggaran asas tidak serta-merta menyebabkan suatu keputusan batal demi hukum, kecuali dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.

Henry menambahkan, secara formal seluruh tahapan pengangkatan Adies telah terpenuhi. Proses dimulai dari pengusulan oleh DPR, penetapan melalui Keputusan Presiden, hingga pelantikan di hadapan Presiden. Keputusan Presiden yang sah, menurutnya, mengandung asas praduga keabsahan dan tetap mengikat selama tidak dibatalkan melalui putusan pengadilan. "Selama tidak ada putusan pengadilan atau pembatalan Keppres, maka status hukumnya tetap sah," ujarnya.(wid,ist,blo/dya)



Adi Sutarwijono

Ketua DPRD Kota Surabaya

Bahtiar Rifai

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Laila Mufidah

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Arif Fathoni

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya